

**PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALI NAGARI DI
KENAGARIAN RABI JONGGOR, GUNUNG TULEH, PASAMAN
BARAT, SUMATERA BARAT TAHUN 2014**

Oleh: Rahmad Mulyadi

Nim : 1201112445

Email: mulyaloebis@yahoo.co.id

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Choosing is an autonomous activity, in the sense of non-pressure and coercion from others. The sociological approach tends to place voting in relation to the social context. The concrete of one's choice in elections is influenced by demographic and socioeconomic backgrounds, such as gender, residence (city-village), occupation, education, class, income and religion. The sociological approach explains, social characteristics and groupings are factors that influence voter behavior.

The research method used in this research is descriptive research with qualitative analysis method. This study aims to see how the behavior of voters in the election Wali Nagari in Kenagarian Rabi Jonggor, Mount Tuleh, West Pasaman, West Sumatra Year 2014 that affect the election of one candidate in Pilwana. This study is also to find out how the shift in voter behavior in the context of the social structure of society in Rabi Jonggor kenagarian previously held by other elite groups. So that the influence of various social factors greatly influence voter behavior in determining the choice that make an elite group in government is shifted by other elite group in Kenagarian Rabi Jonggor.

The selection of Wali Nagari in Rabi Jonggor Kenagarian Year 2014 shows that the main factor of voters in determining their choice based on sociological approach can be seen from education side, family background or kinship and social class. These three sides determine the voter's behavior in determining the choice because the other side of the sociological approach is not very influential in determining voter behavior, so that the three sides of voter behavior becomes a reference in determining how voters behavior in the election of Wali Nagari Year 2014.

Keywords: Pilwana, Nagari, Sociological Approach, Voter Behavior

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana bagi suatu pemerintahan mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menjalankan kekuasaannya. Legitimasi sangat penting bagi suatu pemerintahan, legitimasi akan mendatangkan kestabilan dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat pada pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum dalam situasi yang sulit dan pelik, pemerintah yang memiliki legitimasi dari masyarakat akan lebih dapat mengatasi permasalahan daripada pemerintah yang kurang mendapat legitimasi.

Legitimasi itu hanya absah jika pemilu terselenggara dengan konsisten dan konsekuen. Konsisten pada asas-asas langsung, umum, bersih, jujur dan adil (Pasal 22E, ayat 1 UUD 1945). Pemilu merupakan mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum, sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat. Dengan demikian pemilu dapat menjadi suatu momen yang strategis bagi Indonesia untuk melanjutkan pembaruan-pembaruan progresifnya yang makin mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.

Jauh sebelum ada pemilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, rakyat desa sudah berpengalaman menggelat *demokrasi electoral* secara lokal dalam arena pemilihan Kepala

Desa/Wali Nagari (Sumatera Barat) secara langsung. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung itu sudah diterapkan sejak Raffles berkuasa di Nusantara (**Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984**). Meski Orde Baru mematikan secara tegas otonomi desa, tetapi pemilihan Kepala Desa secara langsung tetap dipertahankan. Secara teoritis, pemilihan Kepala Desa adalah arena *demokrasi electoral* untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yang melibatkan kompetisi secara bebas dan partisipasi langsung rakyat desa.

Sudah lama menjadi pengetahuan bersama bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan “pesta demokrasi” yang paling dekat bagi masyarakat desa. Tetapi tidak semua orang desa memahami lebih dalam tentang pesta demokrasi. Pemahaman tentang pesta demokrasi juga tampak beragam. Kebanyakan orang awam melihat Pilkades/Pilwana sebagai arena untuk memilih figur yang dekat dengan mereka (karena tetangga atau kerabat). Kalangan generasi tua mempunyai kearifan lokal (bibit, bebet, dan bobot) dalam melihat figur. Sementara kaum pemuda yang kritis melihat pemilihan Kepala Desa sebagai pintu masuk perubahan, bahkan sebagai arena untuk merebut kekuasaan secara demokratis.

Memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan dalam Negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Masyarakat yang memandang kelompok atau publik lebih penting dari pada definisi situasi yang diberikan oleh individu cenderung mempersukar individu untuk membuat keputusan yang berbeda ataupun bertentangan dengan pendapat kelompok atau Negara tersebut. Oleh karena itu, perilaku memilih di beberapa Negara berkembang harus pula ditelaah dari segi pengaruh kepemimpinan terhadap pilihan pemilih.

Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional (Kepala Adat dan Kepala Suku), religius (Pemimpin Agama), patron-klien (tuan tanah-buruh penggarap), dan birokratik-otoriter (para pejabat pemerintah, polisi dan militer). Pengaruh pemimpin ini tidak selalu berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi, dan ancaman paksaan.

Menurut **Adam, Merrill III**, dan **Grofnann (2005)**, ada tiga sudut pandang yang bisa digunakan dalam memahami perilaku pemilih, yakni :

- a. Model *spatital* (para pemilih termotivasi akibat serangkaian kebijakan yang ditawarkan, sedang dan/atau dijalankan kandidat).
- b. Model *behavioral* (keputusan para pemilih tidak hanya dipengaruhi faktor kebijakan tetapi juga dipengaruhi faktor identifikasi partai politik, karakteristik sosio-demografis, persepsi pemilih terhadap kondisi ekonomi, evaluasi retrospektif pemilih terhadap kinerja *incumbent*).
- c. Model *party competition* (perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor loyalitas kepada

partai politik, kemampuan pemilih menganalisa program-program yang ditawarkan kandidat, dan persepsi bahwa tidak ada kontestan pemilihan umum yang efektif).

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, tetapi terdapat pula sejumlah faktor penting lainnya. Sekelompok orang bisa saja memilih sebuah partai atau kandidat politik karena dianggap sebagai representasi dari agama dan keyakinannya. Tetapi sekelompok lainnya memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representasi dari kelas sosialnya. Ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada partai atau figur tokoh tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (pasal 22E ayat 1 UUD 1945). Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi jelas. Hasil pemilu adalah orang-orang yang terpilih mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Dengan demikian, pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai.

Berdasarkan Permen Nomor 112 Tahun 2014, pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih

Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut **Mulyawarman (2008)** pemilihan Kepala Desa adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Mulyawarman** juga menambahkan pemilihan Kepala Desa juga merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Pemilihan Kepala Desa dilakukan setiap periode enam tahun, kemudian Kepala Desa dapat dipilih kembali dalam dua kali periode berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak, sesuai dengan Permen Nomor 112 Tahun 2014 pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 47 ayat 1 dan 2.

Pemilih dan kandidat merupakan subjek dalam pemilihan umum. Keduanya mempresentasikan warga Negara yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih. Perbedaan keduanya terletak pada pelaksanaan hak konstitusional ini. Jika pemilih merealisasikan hak memilihnya,

Perbedaan antara pemilih dan kandidat bisa maka kandidat (baik yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan dan/ atau melalui jalur partai politik) merealisasikan hak untuk memilih. dijelaskan melalui aspek perilaku. Maksud aspek perilaku dari sisi pemilih adalah respon fisik, psikis dan sosial yang diberikan kepada pemilih akibat kehadiran stimulus dari dalam dan luar dirinya yang mempengaruhi pilihan akhirnya dalam proses pemilihan umum. Sedangkan dari sisi kandidat, aspek perilaku merujuk pada serangkaian respon fisik, psikis dan sosial yang diberikan kandidat

untuk mempengaruhi keputusan akhir para pemilih dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum apapun sistem dan metodenya, keputusan akhir para pemilih berada pada dua spectrum pilihan, yakni : memilih dan/atau tidak memilih.

Perilaku pemilih merupakan tindakan para pemilih dalam memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah (**Nasrudin, 2010**). **Plano, Ringgs, dan Robin (1985)** dalam **Firdaus (2014)** berpendapat bahwa perilaku pemilih yakni kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum serta latar belakang mengapa mereka melakukan pilihan itu. Mengacu pada dua pengertian diatas maka perilaku pemilih adalah tindakan individu atau tingkah laku pemilih mengenai sebab mereka melakukan proses pemilihan Kepala Desa.

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, namun terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilih dapat saja memilih seorang calon baik calon Kepala Daerah maupun calon anggota dewan, karena dianggap sebagai representatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut diperlukan dalam rangka calon menyusun strategi pemasaran dirinya atau juga programnya. Informasi mengenai berbagai variabel tersebut jelas berguna dalam menyusun strategi komunikasi, manajemen kandidat, dan penyusunan isu serta

kebijakan yang akan ditawarkan kepada para pemilih.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

Subkultur tertentu memiliki kognisi tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu. Kognisi yang sama antar anggota subkultur terjadi karena sepanjang hidup mereka dipengaruhi lingkungan fisik dan sosio-kultural yang relatif sama. Mereka dipengaruhi oleh kelompok-kelompok referensi yang sama. Karena itu mereka memiliki kepercayaan, nilai, dan harapan yang relatif sama, termasuk dalam kaitannya dengan preferensi pilihan politik. Dengan pendekatan ini, para anggota subkultur yang sama cenderung mempunyai preferensi politik yang sama pula. Bagi **Dan Nimmo (1989)** Kepercayaan, nilai, dan harapan masing-masingnya sering juga disebut sebagai unsur kognitif, afektif dan konatif, akan menunjukkan arah perilaku seseorang. Kepercayaan mengacu kepada apa yang diterima sebagai benar atau tidak benar tentang sesuatu. Kepercayaan didasarkan pada pengalaman masa lalu, pengetahuan dan informasi sekarang, dan persepsi yang sinambung. Nilai melibatkan kesukaan dan ketidaksukaan, cinta dan kebencian, hasrat dan ketakutan seseorang. Sementara itu, pengharapan mengandung citra seseorang tentang

akan seperti apa keadaannya setelah tindakan. Pengharapan diutarakan dalam pertimbangan : apa yang terjadi di masa lalu, seperti apa keadaan sekarang, dan apa kiranya yang akan terjadi jika dilakukan tindakan tertentu.

Pendekatan sosiologis menjelaskan, karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku memilih, dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok (**Nimmo, 1993**).

Model ini dikenal sebagai model perilaku memilih Mazhab Columbia (**Asfar, 1993**). Cikal bakalnya berasal dari eropa, model ini kemudian dikembangkan oleh para sosiolog Amerika Serikat yang mempunyai latar belakang eropa, khususnya di universitas Columbia. Menurut mazhab Columbia, Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial-usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku memilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Dalam banyak penelitian, faktor agama, aspek geografis (kedaerahan), dan faktor kelas atau status ekonomi (khususnya di Negara-negara maju) memang mempunyai korelasi nyata dengan perilaku memilih.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Kenagarian

Rabi Jonggor, Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2014 ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut **Hamidi** penelitian kualitatif mengumpulkan data berupa cerita rinci dari pada informan dan diungkapkan dengan apa adanya sesuai dengan bahasa, dan pandangan peneliti.

Alasan memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta atau fenomena serta gejala yang terjadi menurut bahasa, cara pikir, pandangan subjek penelitian dan memahami secara sistematis dan akurat yang berhubungan dengan realita di lapangan berdasarkan data atau informasi yang ada.

Penelitian kualitatif ini menekankan pada makna penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Pendekatan kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu urutan kegiatan-kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan penelitian, konsep-konsep yang ada pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai *grounded theory research*.

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dengan alasan ingin mengetahui tentang bagaimana perilaku masyarakat pemilih dan bagaimana pergeseran perilaku pemilih tersebut dalam Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses dan Tahapan Dalam Pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Tahun 2014

Dalam melaksanakan pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor tahun 2014, ada beberapa tahapan atau proses dalam pelaksanaannya sehingga terwujud suatu pemilihan yang berdasarkan pada asas pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis sesuai dengan asas dalam pemilihan Wali Nagari ini yaitu Pemilihan "*Badunsanak*". Untuk itu dalam rangka pemilihan Wali Nagari maka Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) membentuk suatu Panitia Pemilihan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur perangkat nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Proses pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Rabi Jonggor dibentuk dan disetujui dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari dan ditetapkan dalam ketetapan atau

Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Rabi Jonggor Nomor : 02/BAMUS-RJ/SK/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mensukseskan pemilihan Wali Nagari dalam artian bahwa pemilihan Wali Nagari akan berhasil dan lancar jika para Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dibentuk oleh Bamus menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Panitia Pemilihan Nagari (PPN) memiliki tanggung jawab dalam mensukseskan acara pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor dan mereka secara langsung bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Nagari.

Adapun proses dan tahapan dalam pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Penjaringan Bakal Calon Wali Nagari

Dalam tahapan penjaringan bakal calon Wali Nagari ini, para bakal calon wajib mengusulkan pencalonan secara tertulis kepada salah satu unsur Bamus Nagari Rabi Jonggor. bakal calon yang ingin mencalonkan dirinya pada pemilihan Wali Nagari harus dan wajib melalui langkah membuat pernyataan secara tertulis kepada salah satu unsur dari Bamus dalam pencalonan nya. Unsur dari Badan Permusyawaratan Nagari ini nantinya akan menjadi wadah atau alat bagi bakal calon yang ingin mencalonkan dirinya dalam Pemilihan. Unsur Bamus seperti yang disebutkan terdiri dari lima unsur yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan unsur Pemuda yang nantinya menjadi

salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pemilihan wali nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Tahun 2014, karena itu juga merupakan hal penting yang dicantumkan dalam peraturan daerah yang memuat bahwa dalam unsur pemerintahan Nagari harus ada beberapa unsur yang menjadi penyokong dalam pelaksanaannya.

Begitu penting nya peran dari unsur-unsur tersebut dalam masyarakat sehingga dalam pencalonan di haruskan melalui salah satu unsur. Unsur-unsur yang terdapat dalam Bamus menjadi hal sangat penting dalam pemilihan wali nagari, ini ditandai dengan proses pencalonan harus melalui unsur tersebut. Walaupun secara tertulis tidak dimasukkan dalam struktur organisasi Bamus Nagari Rabi Jonggor akan tetapi itu merupakan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang selalu dipelihara dan tetap di junjung tinggi dalam kehidupan bernagari.

Ini sangat penting dalam menjaga nilai partisipasi berbagai pihak yang ingin mencalonkan diri atau mengusung individu tertentu secara terbuka kepada lima unsur tersebut. Dalam dinamika yang sesungguhnya bahwa di dalam pencalonan bakal calon Wali Nagari telah melalui tahapan kompetisi semenjak menjadi bakal calon Wali Nagari.

bakal calon akan bertarung lebih awal untuk mendapatkan posisi dalam salah satu unsur yang ada, jika ternyata bakal calon yang mendaftarkan diri memiliki persentase yang banyak dalam satu unsur saja maka unsur yang bersangkutan harus melakukan seleksi terlebih dahulu karena dalam

satu unsur hanya dapat mencalonkan satu calon saja dalam Pemilihan Wali Nagari Rabi Jonggor.

2. Tahapan Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari

Setelah tahapan penjaringan bakal calon Wali Nagari selesai maka proses selanjutnya adalah proses penyaringan bakal calon Wali Nagari untuk selanjutnya di sahkan menjadi calon Wali Nagari yang sah untuk dapat ikut bertarung dalam pemilihan Wali Nagari Kenagarian Rabi Jonggor tahun 2014. dalam proses penyaringan bakal calon menjadi calon merupakan tahapan yang sangat penting dalam menetapkan bakal calon menjadi calon nantinya. Ini berkaitan dengan bagaimana pentingnya dokumen-dokumen bakal calon yang menjadi persyaratan dalam menjadi calon nantinya.

3. Tahapan Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Wali Nagari

Tahapan selanjutnya yang menjadi hal yang sangat penting dalam pemilihan Wali Nagari adalah tahapan dalam hal menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari untuk maju dan bertarung di putaran final pemilihan Wali Nagari tahun 2014. Setelah tahap penjaringan dan penyaringan yang dilakukan sebelumnya, para bakal calon yang telah melengkapi persyaratan dan telah dinyatakan lolos seleksi pada tahapan ini, maka Panitia mengajukan Bakal calon tersebut untuk diajukan kepada Bamus dalam rangka untuk ditinjau lanjut.

bakal calon yang mencalonkan diri akan ditetapkan melalui sidang Paripurna Bamus Nagari bersama Panitia Pemilihan Wali Nagari Rabi Jonggor. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari, bakal calon yang nantinya akan ditetapkan dalam sidang rapat Paripurna Bamus Nagari menjadi calon Wali Nagari yang sah adalah paling banyak lima orang calon. Hal ini juga berhubungan langsung dengan lima unsur yang ada di dalam Bamus nagari karena calon-calon Wali Nagari yang akan bertarung dalam memperebutkan kekuasaan tertinggi di tingkat nagari harus mewakili salah satu unsur yang ada dalam Bamus nagari.

Setelah para calon Wali Nagari dikukuhkan sebagai calon dalam rapat paripurna Bamus Nagari bersama Panitia Pemilihan Wali Nagari salah satu calon mengundurkan diri yaitu atas nama Efriwan nomor urut 2 usulan dari unsur ninik mamak hal ini ditetapkan berdasarkan pada surat keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari Nomor 27/Pan-pilwana/RJ/SP/IX/2014 tertanggal pada 27 September 2014 .

4. Kampanye Calon Wali Nagari

Setelah dilakukannya penyampaian visi dan misi dalam sidang paripurna Bamus Nagari yang dilakukan satu arah tanpa adanya proses Tanya jawab seperti yang telah ditetapkan sebelumnya maka ditetapkan lah calon Wali Nagari berdasarkan pada Ketetapan Bamus Nagari Rabi Jonggor Nomor 02/BAMUS-RJ/SK/8/2014. Dalam

sidang Paripurna Bamus nagari juga setelah ditetapkannya calon yang sah, maka juga ditentukan nomor urut yang akan dipakai oleh para calon Wali Nagari.

Penetapan calon Wali Nagari oleh Bamus Nagari kemudian diserahkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk ditindak lanjuti dalam hal pembuatan gambar dan pensosialisasian para calon Wali Nagari kepada masyarakat nagari. Kemudian ditetapkan lah wilayah kampanye oleh Panitia Pemilihan.

Pembagian wilayah kampanye oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah suatu kebijakan yang dilakukan dalam pemilihan wali nagari ini. Masa kampanye yang dilakukan oleh calon wali nagari ditetapkan Tanggal 18 September sampai dengan 24 September 2014. Masa kampanye ditentukan oleh Bamus Nagari dengan persyaratan khusus yang akan dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

B. Pemilihan Badunsanak

Pemilu Badunsanak adalah istilah yang dipakai dalam setiap perhelatan politik di Sumatera Barat, mulai dari pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden sampai Pemilihan Kepala Daerah. Istilah pemilu Badunsanak dipopulerkan dan dicanangkan sejak Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2005. Konsep Pemilihan Badunsanak ini dapat diartikan sebagai Pemilihan yang didasarkan pada semangat persaudaraan.

Pemilu badunsanak merupakan sebuah komitmen moral antara Penyelenggara peserta Pemilihan dan masyarakat untuk menghadirkan kontestasi politik tanpa kekerasan,

tanpa kecurangan dan mengedepankan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Pemilu badunsanak menghindari kepada hal-hal yang tidak di inginkan dalam pemilihan umum.

seperti halnya yang terjadi di berbagai daerah pemilihan umum cenderung melahirkan berbagai persoalan dan konflik di masyarakat. Konflik yang terjadi merupakan bentuk dari dukungan kepada salah satu calon yang terlalu loyal sehingga mereka bisa saja melukai pendukung calon lain jika pendukung calon lain melakukan hal-hal yang bertentangan atau menjelekkan calon yang di dukungnya tersebut.

Untuk itu pemerintah Sumatera barat melahirkan suatu konsep yang dinamakan 'Pemilu Badunsanak' untuk meminimalisir terjadinya berbagai konflik sosial dalam masyarakat baik itu antar pendukung maupun calon yang maju dalam pemilihan umum. Sehingga pemilu yang dilaksanakan tidak sampai merusak kohesivitas sosial, hubungan kekerabatan, pertemanan dan hubungan persaudaraan yang ada antar masyarakat maupun antar calon itu sendiri.

Dalam hal ini Pemilu badunsanak bukan berarti meniadakan kompetisi tetapi berkompetisi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dan dianut oleh masyarakat minangkabau. Pemilihan dapat terwujud sebagai mana yang di inginkan jika penyelenggara pemilihan bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Penyelenggara pemilihan Wali Nagari harus independen, tidak dibenarkan dan sangat dilarang jika nantinya ada keberpihakan dari

penyelenggara pemilihan kepada salah satu calon, ini akan merusak citra dari Pemilihan Badunsanak yang ada. Karena independensi penyelenggara pemilihan merupakan wujud dari integritas sebagai Panitia Penyelenggara Pemilihan Wali Nagari.

Konsep pemilu Badunsanak yang dicanangkan di Sumatera Barat mulai dari tingkat Pemilihan Kepala Daerah sampai pada tingkat terendah yaitu Pemilihan Wali Nagari merupakan konsep yang sampai saat ini sangat efektif di masyarakat Sumatera Barat, hal ini juga dapat dilihat dalam berbagai pemilihan umum jarang sekali terjadi konflik yang melibatkan antar pendukung atau pun calon yang bertarung. Semua nya dapat memahami dengan sangat baik bahwa Pemilihan Umum bukan ajang untuk mencari kesalahan calon lain ataupun mencari kesalahan pendukung lain, akan tetapi merupakan ajang kompetisi yang menonjolkan aspek kepemimpinan, kejujuran dan potensi yang dimiliki oleh calon yang ada. Sehingga sangat jelas bahwa konsep Pemilu Badunsanak sejatinya adalah salah satu cara dalam melahirkan calon yang berkualitas, berintegritas dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk terpilihnya menjadi pemimpin di daerah yang bersangkutan.

Pemilu Badunsanak juga merupakan cara untuk meminimalisir terjadinya konflik di tengah masyarakat. Sehingga dengan pemahaman konsep pemilu badunsanak tersebut masyarakat dapat memahami secara jelas bahwa pemilu merupakan ajang untuk mencari dan mendapatkan seorang pemimpin yang berkualitas dan dapat memajukan daerahnya dan Bukan

untuk mencari kesalahan-kesalahan yang terdapat pada calon atau pun pendukung calon yang bersangkutan.

C. Analisis Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Wali Nagari Kenagarian Rabi Jonggor Tahun 2014

Perilaku pemilih merupakan tindakan para pemilih dalam memberikan suaranya dalam setiap perhelatan Pemilihan umum (Nasrudin, 2010). Perilaku pemilih juga merupakan tindakan individu atau tingkah laku pemilih mengenai sebab mereka melakukan proses pemilihan. Hal ini merupakan tolak ukur dimana perilaku pemilih dalam suatu waktu bisa berubah-ubah tergantung pada beberapa variabel yang membuat perilaku pemilih dalam pemilihan bisa beralih dari calon yang satu kepada calon yang lain. Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan kecenderungan menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Pendekatan sosiologis menjelaskan karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok (Adnan Nursal, 2004).

Beberapa variabel yang mempengaruhi perilaku pemilih dilihat dari segi sosiologis adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu segi yang wajib ada dalam diri seorang calon. Jika dilihat dari segi pengetahuan sudah barang tentu

bahwa faktor pendidikan tidak bisa dikesampingkan begitu saja, walaupun hanya dalam masyarakat terpencil sekalipun. Dikenagarian Rabi Jonggor bisa disebut sebagai nagari yang berada di perbatasan dengan Provinsi lain dan merupakan salah satu daerah terpencil, akan tetapi dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum segi Pendidikan merupakan hal yang menjadi salah satu segi yang dilihat oleh para pemilih dalam menentukan pilihannya.

Variabel pendidikan sangat penting sekali dalam mencari dukungan dari masyarakat, karena masyarakat sudah cukup pintar dalam memilih dan memilah calon yang akan dipilihnya nanti. Karena beberapa tahun terakhir, pemilihan Wali Nagari menjadi ajang yang sangat dingin dan bisa dibilang kurang peminat dari masyarakat kenagarian rabi jonggor. Karena untuk dua periode sebelumnya Wali Nagari yang sama terpilih dengan kemenangan telak karena tidak ada banyak calon yang bertarung dalam pemilihan Wali Nagari. Tidak seperti tahun ini pemilihan Wali Nagari menjadi ajang yang sangat meriah dan menyuguhkan persaingan yang ketat dengan lima calon yang bertarung dalam pemilihan.

b. Latar Belakang Keluarga atau Kekerabatan

Latar belakang keluarga menjadi modal yang sangat penting bagi para calon dalam berbagai pemilihan umum, tidak terkecuali dalam pemilihan Wali Nagari. Latar belakang keluarga sudah barang tentu menjadi faktor perekat antara calon dan para pemilih nya, apalagi jika pemilihan tersebut dilakukan di suatu desa dalam bentuk pemilihan Wali

Nagari, faktor keluarga sangat lah menonjol dan sangat berpengaruh dalam pemilihan. Calon yang memiliki keluarga dan kerabat yang banyak sudah barang tentu menjadi pendukung utamanya dalam pemilihan, apalagi calon yang mencalonkan diri adalah pribadi yang dikenal memiliki kepribadian yang baik dalam keluarga ataupun kerabatnya. Faktor latar belakang keluarga atau pun kekerabatan yang baik dan dikenal luas dalam masyarakat menjadi suatu modal bagi para calon untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat.

Sudah barang tentu jika pemilihan dilaksanakan di pedesaan atau nagari faktor kekerabatan menjadi hal yang utama dalam menarik simpati para pemilih karena faktor-faktor yang lain seperti kelas sosial dan pendidikan tidak begitu menonjol dalam sistem kemasyarakatan desa atau nagari. Maka sistem kekerabatan menjadi hal yang sangat ampuh dalam mencari dukungan dalam pemilihan umum.

Dalam pemilihan wali nagari tahun 2014 ini pengaruh dari kerabat lain juga sangat besar dalam menarik simpati pemilih dalam arti lain bahwa saudara atau kerabat dari calon Wali Nagari cukup memiliki andil besar dalam memenangkan pemilih. Salah satu calon memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat dengan salah satu tokoh masyarakat yang sangat disegani dalam kenagarian. Dalam pencalonannya juga kerabatnya tersebut ikut membantu dalam mencari pendukung sehingga masyarakat sudah barang tentu memilih calon yang di dukung oleh pemuka masyarakat tersebut karena dianggap bahwa calon itu merupakan

bentuk perwakilan dari tokoh yang disegani itu.

Pengaruh kerabat lain juga sangat besar terhadap terpilihnya salah satu calon. Apalagi kerabat dari calon tersebut merupakan tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati oleh masyarakat nagari, dan sudah barang tentu banyak dari masyarakat yang memilih calon tersebut bukan karena kedekatan atau mengenal calon tetapi lebih kepada nilai loyalitas dan rasa hormat kepada kerabat calon tersebut dan bukan kepada calon itu sendiri. Sehingga nilai plus terhadap salah satu calon menjadi semakin tinggi di mata masyarakat dikarenakan kerabat dekat dari calon itu mempunyai pengaruh yang besar dan dihormati dalam masyarakat nagari.

c. Kelas Sosial

Kelas sosial dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang nyata jika disandingkan dengan adanya pemilihan umum, dimana kelas sosial yang mempunyai berbagai macam tingkatan dalam masyarakat sangat lah berpengaruh pada kehidupan pribadi seseorang apalagi jika dikaitkan dengan pemilihan umum yang berarti kelas sosial seorang juga sangat diperhatikan. Kelas sosial menggambarkan dari mana kita berasal dan bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari jika dilihat berdasarkan kelas tersebut. Sehingga sudah barang tentu kelas sosial menjadi acuan seorang pemilih dalam menentukan pilihannya. Karena pengaruhnya yang sangat besar, kelas sosial menjadi pertimbangan yang nyata bagi masyarakat untuk memilih apakah seorang calon itu berasal dari kelas sosial yang terhormat atau

terpandang ataukah hanya berasal dari kelas sosial yang biasa saja dalam masyarakat.

Dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada di kenagarian Rabi Jonggor seperti yang sudah dijelaskan diatas mempunyai lima unsur yang melekat dalam sistem masyarakat nagari Rabi Jonggor. Lima unsur tersebut adalah Bundo Kanduang, Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, dan Pemuda. Kelima unsur tersebut mencerminkan apakah seseorang tersebut berasal dari kalangan bundo kanduang atau unsur yang lainnya dan itu sangat mempengaruhi pada tingkat dukungan pemilih terhadap seorang calon.

Faktor kelas sosial atau dalam masyarakat nagari biasa disebut orang terhormat merupakan salah satu faktor yang membuat para pemilih mendukung salah satu calon karena bisa dibayangkan harapan untuk memimpin nagari harus berada pada tangan orang-orang yang dihormati dalam masyarakat. Ini menandakan bahwa masyarakat nagari Rabi Jonggor sangat mempertimbangkan dari kelas mana sang calon berasal dan memiliki latar keluarga yang bagaimana calon tersebut sehingga pantas untuk dipilih dalam pemilihan Wali Nagari.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data dan analisis penulis tentang Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor, Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2014, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Tahun 2014 merupakan pemilihan yang didasarkan pada semangat persaudaraan dengan adanya konsep 'Pemilihan Badunsanak'. Konsep Pemilihan Badunsanak bukan berarti meniadakan pertarungan atau kompetisi justru dalam pertarungan yang sesungguhnya para pemilih maupun calon tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan persatuan supaya dalam pemilihan Wali Nagari tahun 2014 melahirkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat.
2. Proses pemilihan wali nagari mulai dari penjaringan calon sampai kampanye calon dilakukan dengan semangat persaudaraan sehingga konflik dalam pemilihan wali nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Tahun 2014 ini bisa dibilang tidak ada sama sekali baik itu dari pemilih maupun dari calon itu sendiri.
3. Perilaku pemilih yang dilihat berdasarkan sisi sosiologis menunjukkan bahwa pemilih di Kenagarian Rabi Jonggor lebih melihat calon dari sisi latar belakang keluarga dan kekerabatan disusul faktor kelas sosial calon ditengah masyarakat dan faktor pendidikan juga sangat dipertimbangkan sehingga kolaborasi dari ketiga faktor tersebut yang terdapat pada salah satu calon membuat pemilih tentunya memilih calon yang mempunyai sisi dari ketiga faktor tersebut.

Saran

1. walaupun dilabeli dengan konsep pemilihan badunsanak bukan berarti meniadakan kompetisi yang ada antar calon wali nagari, akan tetapi mengandung semangat dalam membangun nagari diatas persaudaraan dan persatuan. Sehingga konsep ini perlu menjadi perhatian dalam pemilihan-pemilihan mendatang.
2. memberikan pemahaman dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat bahwa pemilihan wali nagari bukan ajang untuk mencari kesalahan calon maupun pendukung calon tertentu tetapi mencari seorang pemimpin berdasarkan hati nurani rakyat dengan semangat persaudaraan yang ada. Sehingga kinerja dari Bamus Nagari dan Panitia Pemilihan wali nagari perlu diapresiasi dalam hal ini.
3. Walaupun dalam memilih salah satu calon wali nagari di Kenagarian Rabi Jonggor oleh masyarakat berdasarkan pada pertimbangan kekeluargaan dan kekerabatan, akan tetapi yang menjadi hal pokok dalam memilih pemimpin harusnya didasarkan pada pantas atau tidak pantasnya seseorang menjadi pemimpin ditengah masyarakat dilihat dari sisi kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press. Malang.

Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.

Ghalia Indonesia. Jakarta.

Indra, Ismawan. 1999. *Money Politics, Pengaruh Uang dalam Pemilu*. MediaPressindo. Yogyakarta.

Kana. 2001. *Perubahan di Dalam Dinamika Politik Pedesaan*. Pustaka Percik. Salatiga.

Nurkholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.

Rozaki, Abdur dan Hesti Renandari. 2007. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi – Naskah Akademik dan Legal Drafting*. IRE Press. Yogyakarta.

Sudjatmiko, Budiman dan Yando Zakaria. 2015. *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Pustaka Yustisia. Jakarta.

Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. GMU Press. Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo. Jakarta.

Sutono, Eko. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa, Persembahkan 40 Tahun STPMD "APMD"*. APMD Press. Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 32 Tahun 2011 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Sumber Lain

Data Panitia Pemilihan Wali Nagari, Kenagarian Rabi Jonggor Tahun 2014.

Data Badan Permusyawaratan Nagari Rabi Jonggor Tahun 2014

Data Kecamatan Gunung Tuleh Dalam Angka Tahun 2014.

Data Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2014.

Profil Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh,

Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2014.

Statistik Daerah Kecamatan Gunung
Tuleh Tahun 2014.

Statistik Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2014.